

Membedah Urgency Isu Dugaan Penyalahgunaan Gerakan *People Power* (Sejumlah Tokoh) Terhadap Ketidakpuasan Kinerja KPU Pada Pemilu Tahun 2019

Imam Hidayat

Email : imamhidayat@wiraraja.ac.id

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wiraraja

Abstrak

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil sehingga cita-cita dari demokrasi yang menyentuh semua lapisan publik dapat terwujud yaitu melalui indikator kinerja birokrasi sebagai materi dalam menentukan sikap dan menilai apakah kinerja KPU sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan dan pengetahuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum sehingga membuka wawasan cakrawala bagi penulis dan pembaca dengan tidak terprovokasi atas ajakan *People power* (sejumlah tokoh) yang akhir-akhir ini menjadi isu utama dalam publik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang selanjutnya dianalisa dengan analisis kualitatif yaitu mengenai fenomena ajakan *People power* kemudian dicarikan solusi dengan memahami teori kinerja dari beberapa materi dan sumber yang dikemukakan oleh Dwiyanto, 2009:228-229 tentang kinerja birokrasi yang meliputi : 1. Produktivitas, 2. Kualitas pelayanan, 3. Responsivitas, 4. Responsibilitas, 5. Akuntabilitas.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu berdasarkan fokus penelitian diantaranya Produktivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum sangat baik, Kualitas pelayanan kinerja Komisi Pemilihan Umum mengutamakan kepentingan publik, Responsivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ada, Responsibilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum dilakukan dengan prinsip yang benar, Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum memberikan informasi sejelas - jelasnya kepada publik.

Keyword : Isu ajakan *People power*, Indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini publik Indonesia sedang dihadapkan pada konflik bangsanya sendiri, kegaduhan dari pusat sampai tingkat bawah menciptakan isu kontroversial, persial namun tersistematis dan gerakan yang massif, maka tidak heran jika banyak ditemukan bangunan narasi opini yang membentuk

persepsi yang berbeda-beda dari setiap masing-masing individu, kelompok masyarakat (organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan) dan organisasi publik lainnya.

Publik adalah Kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal (Jefkins, 2005), yang secara sadar

mereka bertindak dari titik tertentu ketitik tertentu lainnya. Sehingga, membentuk pola gerakan yang dinamis yang melahirkan tindakan kontroversial antar masyarakat satu dengan lainnya yang terus terjadi secara terus menerus.

Dinamisnya pemikiran kemajemukan kelompok jika dilihat dari fungsi positifnya maka akan membentuk sebuah partisipasi masyarakat sebagai pembelajaran yang signifikan bagi salah satu tindakan kemajuan dari pembangunan nasional serta menghayati pengalaman tentang kedewasaan berdemokrasi. Namun, jika dilihat dari fungsi negatif dari pemikiran kemajemukan kelompok akan menciptakan banyak perbedaan dan membudayakan bangunan opini subyektif, parsial yang diragukan akan kebenarannya. Sehingga, terjadilah gesekan versus diantara masing-masing kelompok atau kelompok masyarakat dengan pemerintah.

Gesekan antar kelompok masyarakat ataupun dengan pemerintah jika tidak diantisipasi sedini mungkin maka akan membentuk bias opini yang fanatik subyektif dan liar sehingga gesekan konflik sosial pun selalu terjadi yang berulang-ulang dengan isu yang sama dan membentuk opini publik.

Hakikat Opini Publik adalah Sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama yang berhubungan dengan arah

opini, pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasional & dukungan sosial (Cutlip, 2007). Bagi sebagian kualisi sejumlah tokoh, opini dengan isu tertentu seringkali digunakan sebagai instrument ampuh dalam membentuk bangunan narasi subtektif, parsial dan memihak. Sehingga yang terjadi, sekerumpunan massa dengan mudah dikendalikan oleh isu kelompok tertentu.

Kasus hari ini, opini dan dari isu subyektif, parsial, dan sepihak yang tidak seimbang benar-benar membius disegala sector, baik dikalangan cendikiawan, birokrat pemerintah, ataupun dikalangan publik. Maka yang terjadi, pandangan dan pendapat mereka terhadap objek masalah menjadi fanatisme sepihak terhadap kelompok dan golongan tertentu. Menurut Dunn (1959), isu kebijakan tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan yang actual dan potensial, tetapi juga mencerminkan petentangan pandangan mengenai sifat masalah tersebut.

Keberpihakan pada kelompok tertentu menimbulkan fanatik tinggi tentu menjadi salah satu masalah sebab dari dari stabilitas nasional terganggu. Kehawatiran masyarakat terhadap keamanan bernegara menjadi kegelisahan publik secara menyeluruh. Yang terjadi akhir-akhir ini, terjadi hal ketegangan

sosial yang melahirkan versus antar kelompok atau dengan pemerintah, yang seharusnya perlu dijaga mengenai stabilitas nasional. Tetapi, fugur dari masing-masing kelompok berhasil membentuk bangunan narasi dan opini yang memunculkan banyak perpecahan dan kerugian dalam kelompok masyarakat bernegara. Menurut James Bryce opini publik adalah kumpulan pendapat orang mengenai hal ihwal yang mempengaruhi atau menarik minat komunitas.

Jika kita menoleh ke beberapa kejadian konflik di timur tengah dipicu dari konflik internal Negara tersebut. Sehingga, kelompok masyarakat sangat mudah untuk dikendalikan emosinya. Kemudian, yang terjadi adalah terhambatnya pembangunan nasional, terganggunya keamanan serta kesejahteraan publik menjadi korban atas isu dan opini publik sepihak yang sengaja diseting oleh sebageian publik figur. Harusnya, figur publik memberikan tauladan yang positif, optimistik yang mampu merencanakan serta mengimplementasikan kebijakan yang menguntungkan untuk publik. Sehingga, Negara menjadi kokoh, kermanan dan stabilitas ekonomi Negara terselamatkan.

Masalahnya, hari ini sebagian publik figur menggambarkan sikap ketidak dewasa sehingga membentuk kekuatan versus yang kemudian melibatkan banyak

kelompok yang dengan gampang emosinya dikendalikan serta terjebak dalam pandangan yang persial dan subyektif dan akhirnya terjadi sebuah konflik kekerasan, ujaran kebencian, hoax saling menjatuhkan diantara beberapa kelompok di Negara ini yang digerakkan oleh kekuatan massa yang militan terhadap salah satu pihak.

Kekuatan massa yang tinggi ini membentuk hal keseragaman pendapat yang kolektif sehingga hal yang belum tentu benar keberadaanya diperjuangkan demi mempertahankan eksitensitas dan status quo dari sebagein kelompok tersebut.

Pergerakan kekuatan massa/rakyat kita mengenalnya dengan kalimat *people power* yang disuarakan oleh publik figur yaitu dengan cara mengerakkan dan memanfaatkan kekuatan rakyat sebagai intrumen kedaulatan yang signifikan dalam memepertahankan pandangannya dan mengalahkan lawan politiknya.

Sebenranya tidak ada yang keliru dari kalimat *People power* ini. Bertanda, bahwa atmosfer demokrasi di Indonesia bisa dinikmati oleh semua rakyat. Namun, menjadi salah ketika *people power* ini digunakan untuk menandingi kekuatan pemerintah yang sah sehingga menimbulkan krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah tanpa mengukur dengan dalam seberapa

gagalnya pemerintah dalam menjalankan tugas kebijakannya.

People Power ini pernah terjadi di Negara ini yaitu pada era otoriterian soeharto, dimana terjadi kekuatan massa oleh mahasiswa di tahun 1998 yang bergerak secara massif terstruktur menkritik keras terhadap kondisi keadaan Indonesia yang pada saat itu sangat terjadi banyak pelanggaran HAM (Hak asasi manusia). Sehingga pada pucaknya presiden soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia.

People power tersebut yang gerakkan oleh sekelompok massa dapat diterima alasan kritisnya oleh nalar akal sehat publik, karena memang terjadi sebuah kekacauan pemerintah yang signifikan, stabilitas nasional terancam, ekonomi Negara semakin melemah sehingga terjadi krisis moneter. Namun, jika dikembalikan pada isu hari ini tentang urgensya gerakan *people power* yang di usung oleh beberapa publik figure dan pelaku politik memiliki sebuah pertanyaan yang perlu digali dan dipertajam mengenai sebab dan akibatnya. Karena, cirri dan indikator kegagalan pemerintah tidak seperti yang dulu pernah terjadi di zaman presiden Soeharto.

People power yang hari ini terjadi bagian dari ikhtiar ke kecewaan dari salah

satu golongan masyarakat yang kecewa atas kinerja Komisi Pemilihan Umum karena diduga adanya intervensi pemerintah dalam memenangkan salah satu calon Presiden 2019.

Penyampian pendapat dengan melibatkan kekuatan massa merupakan ciri dan symbol bahwa demokrasi di Indonesia masih ada, setidaknya meyakinkan kepada publik bahwa Negara ini sedang menganut system demokrasi dan bukan feodalisme atau otoriterian sehingga menyampaikn pendapat dimuka umum dijamin keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Asal, tidak ada niatan makar didalmnya.

Ketidak puasan dari salah satu pihak meruapkan masalah publik yang tidak boleh dibiarkan terus berlanjut , karena ketidak puasan ini akan melahirkan gerakan frontal dan mobilisasi massa yang melahirkan gesekan antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Maka tentu, pihak keamanan selaku pihak yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kemanan dari stabilitas Negara agar terus berlanjut.

People power dan stabilitas nasional dua hal yang berbeda namun memiliki sisi ikatan yang signifikan. Artinya, jika keberadaan potensi gerakan *people power* yang semakin besar maka stabilitas nasional

memiliki potensi signifikan untuk terganggu. Setiap kelompok harusnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak melakukan inkonstitusional dan diberikan ruang untuk menyampaikan ketidak puasannya melalui jalan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah. Jika, ada kinerja KPU yang menyalahi aturan boleh digugat hasil hitungnya melalui Mahkamah Konstitusi.

Disisi lain kinerja Komisi Pemilihan Umum hari ini mendapatkan banyak pertentangan, ada yang pro dan ada yang kontra. Karena, kinerja yang profesional yang tidak memihak terhadap salah satu calon merupakan hal yang harus diwujudkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan kabar berita TV one pada tanggal 29 Mei 2019 jam 17.00 setidaknya ada beberapa publik figur yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan makar dan mengajak dengan narasi provokatif yang melibatkan kekuatan rakyat untuk melakukan aksi besar-besaran sebagai symbol ketidak puasan atas kinerja KPU yang dianggap curang. Maka tolak ukur kinerja dari birokrasi KPU penting untuk dikaji lebih mendalam, hal ini bertujuan agar publik lebih dewasa dalam memahami penggiringan opini yang subyektif dan persial yang masih perlu dibuktikan kebenarannya atas isu yang terjadi sehingga tidak menimbulkan potensi

konflik yang lebih besar antara kelompok masyarakat dengan pemerintah.

Tugas akademisi melalui karya dan tulisannya setidaknya mampu memberikan ulasan yang logis dan rasional serta mampu menjawab masalah konteks melalui perpaduan teori dan fakta dilapangan sehingga menemukan solusi yang matang ditinjau dari sudut pandang teori kinerja birokrasi KPU serta menjadi jawaban atas liarnya opini tentang gagalnya kinerja KPU di pemilu 2019.

Tulisan ini akan menguraikan indikator dan kinerja KPU melalui sudut pandang Dwiyanto pada buku Kebijakan Publik dengan judul Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analisi, setidaknya ada 5 indikator untuk mengukur kinerja Birokrasi. Tentu setiap penulisan karya ilmiah memiliki tujuan yang ingin dicapai, dalam penulisan karya ilmiah ini juga ingin mengetahui dan mengungkap atas Urgency Isu Dugaan Penyalahgunaan Gerakan *People power* (Sejumlah Tokoh) Terhadap Ketidak Puasan Kinerja KPU Pada Pemilu Tahun 2019 dengan mengulas kinerja KPU pada pemilu Tahun 2019.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Opini dan Isu Publik

Opini dan isu publik menjadi alat untuk menyampaikan informasi baik berupa permasalahan, prestasi atau kegagalan dari kinerja petugas publik. tentu, publik akan menerima informasi kejelasan dari permasalahan tersebut bergantung pada penyampaian petugas publik. Menurut Wiliam Dunn (1998), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan, baik tentang rumusan, perincian, penjelasan.

Dunn (1998) menambahkan bahwa isu kebijakan tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan yang actual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan dan pandangan mengenai sifat masalah tersebut.

Menurut Hogwood dan Gunn (1986), isu mengandung peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecendrungan yang dipersepsikan sebagai memiliki nilai potensial yang signifikan, tetapi isu juga mengandung makna masalah atau ancaman.

Dalam pandangan Alford dan Friendland (1985), isu merupakan kebijakan alternative atau proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan tertentu dianggap bermanfaat bagi mereka.

Isu merupakan perbedaan pendapat di masyarakat tentang persepsi dan solusi (*policy action*) terhadap suatu masalah public. Menurut Dunn (1998), isu kebijakan tidak hanya mengandung ketidak sepakatan mengenai arah tindakan yang actual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah tersebut. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan hasil perdebatan tentang definisi, klasifikasi, eksplansi, dan evaluasi masalah. Isu kebijakan tersebut kemudian masuk dalam agenda pemerintah, yaitu sejumlah daftar masalah yang menyebabkan para pejabat public menaruh perhatian serius pada waktu tertentu.

Menurut Herabudin (2016:66) jika satu kelompok melakukan aksi untuk mempengaruhi agar kepentingannya masuk dalam agenda pemerintah dengan mengerahkan sumber daya yang ada padanya, kelompok lain juga akan berusaha untuk melakukan reaksi yang sama kuatnya. Akibatnya, terbentuk kondisi keseimbangan baru yang lebih tinggi dari keseimbangan semula.

Solichin Abdul Wahab (2005:105) Sebagai akibat dari persaingan tajam di antara berbagai kepentingan, hanya beberapa isu yang akan ditindak lanjuti. Isu-isu

tersebut masuk dalam agenda kebijakan melalui cara berikut.

- a. Inisiatif dan prosesnya dilakukan oleh para pengambil kebijakan sendiri. Di Indonesia hal ini terjadi pada proses pembuatan keputusan presiden, keputusan menteri, dan sebagainya.
- b. Desakan pihak lain diluar pemerintah, seperti (Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM], organisasi massa, dan partai politi).
- c. Lembaga lembaga penelitian milik pemerintah melalui penemuan-penemuan ilmiah atau data-data yang dikumpulkan dalam masyarakat. Hal ini banyak terjadi pada berbagai temuan BPPT dan LIPI.
- d. Perseorangan diluar orgnisasi pemerintah yang mengangkat suatu isu dalam masyarkat. Contohnya, isu “Busang” yang diangkat oleh amin rais. Sehingga berkembang menjadi langkah awal dari sebuah reformasi total;
- e. Media massa yang mematangkan suatu isu sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah.

Berkaitan dengan hal itu, ada dua macam agenda kebijakan, yaitu *systemic agenda* dan *institutional agenda*. *Systemic agenda* adalah isu yang secara umum

mendapat perhatian masyarakat dan kalangan politisi, serta berada dalam lingkup yuridiksi pemerintahan. Adapun *instutional agenda* adalah isu yang secara resmi menjadi perhatian serius dari penguasa. Sedangkan jika melihat situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh Negara pada saat ini, berada di dua kondisi tersebut, sehingga isu tertentu dengan mudah mendapatkan perhatian husus yang menimbulkan konflik diantara publik figur politik dan penguasa.

B. Nilai-nilai Dasar Demokrasi

Herabudin (2016:15). Demokrasi, secara harfiah, berarti pemerintahan yang dilakukan dengan menjadikan rakyat (*demos*) sebagai pemegang kekuasaan (*Kratos*) tertinggi. Secara formal, demokrasi di definisikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat di Negara-negara yang sedikit penduduknya, demokrasi bias berjalan secara langsung, yaitu rakyat secara langsung menentukan hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri melalui mekanisme diskusi publik.

Akan tetapi, di Negara-negara penduduk banyak, seperti Indonesia, rakyat diwakili oleh orang-orang yang duduk diperwakilan rakyat dan merekalah yang memastikan bahwa seluruh kerja pemerintahan mengacu pada kepentingan rakyat. Dari sudut pandang ini, demokrasi

mengadaikan nilai-nilai moral-moral tertentu didalam praktiknya, seperti nilai kejujuran, keadilan, keterwakilan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat yang lebih tinggi, dan bukan pada kepentingan yang sebagian kecil kelompok ataupun golongan yang ada di masrakat.

Berkenaan dengan perumusan kebjakan yang mencakup nilai-nilai dasar demokrasi, Harrison menjabarkan nilai-nilai dasar yang menopang paham ataupun sistem politik demokratis yang berpijak pada tiga nilai dasar, yaitu pengetahuan yang memadai tentang hal-hal yang sungguh terjadi di masyarakat, otonomi individu dan otonomi masyarakat dalam membuat kebijakan public, serta kesetaraan antar manusia sebagai subjek hokum yang memiliki harkat dan martabat yang sama.

C. Kemunculan Istilah People Power dan Pengalaman People Power Di Sejumlah Negara di Dunia

People power adalah penggulingan kekuasaan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Upaya ini dilakukan dengan cara seluruh rakyat turun ke jalan agar Presiden melektakkan jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan.

Secara umum, *People power* sama artinya dengan kekuatan masyarakat. Mereka

berusaha melakukan perlawanan dan bentuk protes terhadap bentuk kezaliman dan kesewenangan para penguasa. Pascapemilu di Indonesia, istilah ini mulai ramai diperbincangkan. Banyak rakyat Indonesia yang ingin memberontak terhadap berbagai kebijakan penguasa. Mereka meyakini bahwa ada yang tak beres di balik sistem pemerintahan.

People power mulai dikenal saat demonstrasi massal dilakukan rakyat Filipina tahun 1986 dengan tujuan mengakhiri rezim Presiden Ferdinand Marcos. Sekitar tahun 2010 dan 2011, gerakan serupa kembali merebak dengan tujuan mengakhiri rezim otoriter dan anti-demokrasi di beberapa negara di kawasan Arab, yang sering disebut dengan Arab Spring atau Musim Semi Arab.

1. Filipina

Ferdinand Edralin Marcos merupakan presiden kesepuluh Filipina yang populer lewat pembangunan infrastruktur, kebijakan-kebijakan luar negeri yang aman, dan juga keuangan pemerintahan yang cukup stabil. Marcos memenangkan masa jabatan kedua di pemilu tahun 1969 yang diwarnai berbagai kecurangan dan memakan banyak anggaran. Penyalahgunaan wewenang Marcos dalam keuangan negara membuat Filipina terseret dalam inflasi dan devaluasi yang tinggi.

Selain kecurangan pemilu, dikutip dari *Indopos*, para aktivis mengecam pemerintahan Marcos yang dinilai melakukan praktik korupsi, nepotisme, dan suap. Kepercayaan masyarakat yang berkurang dan kondisi negara yang mulai tidak menentu membuat Marcos mengumumkan Hukum Darurat Militer tahun 1972. Marcos pun mulai menjadi sosok diktator.

Dari kekecewaan rakyat Filipina, lahirlah bibit gerakan *people power* atau revolusi EDSA (Epifano de los Santos Avenue, nama sebuah jalan di Metro Manila). Revolusi EDSA merupakan gerakan demonstrasi yang dilakukan secara damai oleh jutaan masyarakat Filipina dalam menumbangkan rezim Marcos.

Semangat *people power* di Filipina kian terbakar pasca pembunuhan politisi dan senator pro-demokrasi Benigno “Ninoy” Aquino, Jr yang konon didalangi oleh pemerintah Marcos. Di tengah serangkaian aksi, nama Corazon Aquino, istri mendiang Benigno Aquino, muncul mengecam dan menuntut keadilan atas penculikan dan pembunuhan terhadap politisi oposisi. Marcos sempat memenangkan pemilu kembali dengan menempatkan para pendukungnya di komisi pemilihan, menghilangkan hak pilih sebagian masyarakat, hingga membunuh Gubernur

Evelio Javier, pendukung dan sekutu utama Corazon Aquino.

Meski berlangsung berlarut-larut, tidak ada kerusuhan dalam revolusi EDSA karena massa melakukan dengan ceria dan bersemangat. Gerakan *people power* yang merupakan aksi damai tak berdarah akhirnya berhasil menurunkan Marcos dari jabatan presiden Filipina tanggal 25 Februari 1986, melantik Corazon Aquino sebagai penggantinya sekaligus presiden perempuan pertama di Filipina.

2. Tunisia

Arab Spring di Tunisia, Revolusi Yasmin, diawali kerusuhan massal di seluruh negeri akhir bulan Desember 2010. Pemicunya ialah peristiwa pembakaran diri penjual buah dan sayur di pasar Tunisia Mohamed Bouazizi tanggal 17 Desember 2010 untuk memprotes pemerintahan otoriter negaranya. Setelah terjadi demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri, Presiden Tunisia Zainal Abidin Ben Ali melarikan diri dari Tunisia ke Arab Saudi tanggal 14 Januari 2011.

Kekosongan kekuasaan kemudian diisi oleh Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi yang mendirikan pemerintahan sementara tanggal 17 Januari 2011. Tunisia hingga kini masih menghadapi banyak masalah, terutama terkait keamanan. Sementara itu, Ghannouchi digantikan oleh Béji Caïd Essebsi tanggal 27

Februari 2011, yang dilantik menjadi presiden tahun 2014. Essebsi telah berjanji untuk tidak lagi mencalonkan diri pada pemilu bulan November 2019 mendatang.

3. Mesir

Perlawanan di Mesir dimulai tanggal 25 Januari 2011, pada hari yang disebut “Hari Kemarahan.” Presiden Husni Mubarak, yang sudah berkuasa puluhan tahun, kemudian dipaksa turun dari jabatannya tanggal 11 Februari 2011. Setelah kepemimpinan diambil alih Dewan Militer, mereka menjamin pemilu demokratis serta mencabut situasi darurat yang telah berlangsung 30 tahun. Tanggal 2 Juni 2012, Mubarak dijatuhi hukuman seumur hidup, salah satunya karena didakwa membunuh pengunjuk rasa.

4. Libya

Diktator Muammar Gaddafi telah berkuasa di Libya sejak tahun 1969 hingga 2011. Kepemimpinan penguasa yang paling lama bercokol di puncak kekuasaan Libya tersebut mulai goyah awal tahun 2011 ketika Musim Semi Arab mulai menjalar ke Libya dan menyulut demonstrasi di seluruh negeri. Gaddafi pun kehilangan kontrol dan resmi menjadi buronan mulai bulan Juni 2011 karena pelanggaran kemanusiaan.

Tanggal 20 Oktober 2011, Gaddafi tewas dibunuh saat buron. Meski Dewan Transisi Nasional telah dibentuk untuk

mengembalikan situasi di Libya, negara penghasil minyak itu terus diguncang baku hantam antar milisi hingga pemberontakan oleh jenderal militer Khalifa Haftar yang juga merupakan mantan pendukung Gaddafi.

5. Aljazair

Gerakan *people power* di Aljazair dimulai sejak tanggal 28 Desember 2010, salah satunya dipicu revolusi di Tunisia dan Musim Semi Arab di jazirah tersebut. Aksi protes rakyat awalnya disulut oleh meningkatnya harga bahan pangan. Kerusuhan muncul secara spontan dan tidak terorganisir di seluruh negeri. Pihak oposisi saat itu menuntut pencabutan situasi darurat yang telah bertahan selama 19 tahun, yang dipenuhi pemerintah tanggal 24 Februari 2011. Kerusuhan dan demonstrasi terus berlanjut hingga bulan April 2011, ketika protes dinyatakan berhenti.

Meski dengan adanya *people power*, Aljazair hingga sekarang tetap menghadapi banyak masalah. Presiden Abdelaziz Bouteflika kembali terpilih sebagai presiden untuk keempat kalinya tanggal 17 April 2014. Kekuasaannya pun hampir berakhir tahun ini karena oposisi terhadap pemerintahannya kian kuat.

Militer Aljazair yang kuat juga menyerukan bahwa presiden berusia 82 tahun yang kini terus sakit-sakitan itu sudah tidak

layak memimpin. Bouteflika akhirnya menyatakan mengakhiri kepemimpinannya selama 20 tahun pada akhir masa jabatannya tanggal 28 April 2019.

6. Maroko

Dikutip dari *Deutsche Welle*, Maroko adalah negara monarki konstitusional yang sejak 1999 dipimpin oleh Raja Muhammad VI. Negara yang miskin tapi stabil secara politik tersebut mulai diguncang gelombang Musim Semi Arab setelah seruan people power di Facebook. Tanggal 20 Februari 2011, disebut juga dengan Hari Kehormatan, ribuan warga berdemonstrasi menuntut reformasi politik dan demokrasi. Usai kerusuhan yang menimbulkan sejumlah korban tewas, raja bereaksi dengan mengumumkan reformasi politik tanggal 10 Maret 2011.

Referendum konstitusi dilaksanakan setelah Musim Semi Arab, dengan perubahan disetujui oleh 98 persen anggota parlemen. Sejumlah kewenangan dialihkan dari raja ke perdana menteri dan parlemen. Raja Maroko kini wajib mengangkat perdana menteri dari partai yang menduduki kursi mayoritas di parlemen, berbeda dari kepemimpinan sebelumnya di mana raja Maroko bebas mengangkat siapapun yang dia inginkan.

7. Oman

Tahun 2011, Oman turut dilanda gelombang Musim Semi Arab. Dilansir dari *Kompas*, Sultan Oman akhirnya memutuskan menyerahkan sebagian kekuasaan legislatif tanggal 13 Maret 2011. Langkah tersebut diambil sebagai upaya nyata untuk memadamkan protes di segenap wilayah kesultanan di Teluk tersebut.

Sultan Oman Qaboos bin Said juga menyatakan akan menggandakan pembayaran kesejahteraan bulanan dan menaikkan pembayaran pension, membuatnya menjadi penguasa paling akhir di Teluk yang menawarkan peningkatan kesejahteraan warga setelah kerusuhan yang mengguncang sebagian besar dunia Arab.

Sultan Qabos, yang telah memerintah Oman selama 40 tahun, kemudian memecat menteri-menteri dalam perombakan kabinet dan membuat konsesi terbesarnya dengan mengumumkan akan menyerahkan kekuasaan pembuatan peraturan kepada Dewan Oman. Sebelumnya, hanya sultan dan kabinetnya yang dapat membuat peraturan.

Dewan Oman, yang sebelum itu hanya memberikan saran kebijakan, terdiri atas Dewan Syura yang anggotanya dipilih dan Dewan Negara yang terdiri atas anggota yang ditunjuk sendiri oleh sultan.

8. Yaman

Yaman sebagai salah satu negara kawasan Timur Tengah tidak luput dari gelombang Arab Spring. Sejak awal tahun 2011, ribuan demonstran berkumpul di Sanaa dan beberapa kota Yaman untuk meminta Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang telah berkuasa kurang lebih 33 tahun untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Kemiskinan di Yaman memasuki tahap parah, memicu masyarakat menuntut pergantian pemimpin. Ali Abdullah Saleh berulang kali menawarkan konsesi untuk meredakan aksi protes, mulai dari menjanjikan tidak akan mencalonkan diri kembali pada pemilu 2013 hingga mengumumkan referendum yang akan memisahkan kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Tanggal 27 Februari 2012, Saleh pun secara formal mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya Abdrabbuh Mansur Hadi. Yaman pun kembali membangun negara setelah berbulan-bulan aksi yang dipenuhi kekerasan.

9. Indonesia

Di era pemerintahan Orde Baru yang represif, aspirasi politik sangatlah dibatasi dan seringkali berujung kematian maupun penghilangan paksa bagi para aktivis. *People power* tercermin di Indonesia melalui gerakan

mahasiswa yang mengecam penderitaan rakyat di tengah kesulitan ekonomi maupun menggugat pemerintahan diktator Suharto.

Kepada *Tirto*, Harry Wibowo, redaktur pelaksana *Jurnal* dan *Portal Prisma*, mantan aktivis mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, menjelaskan bagaimana gerakan 1998 telah didahului oleh sejumlah protes anti-Orde Baru tahun 1980-an yang sedikit banyak dipengaruhi oleh gerakan *people power* di Filipina. Setelah berulang kali tumbang dan ditumpas oleh pihak berwenang, *people power* membuahkan hasil dalam gerakan 1998 yang menuntut reformasi dan dihapuskannya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) lewat pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi.

Berbagai tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan pemerintah Suharto untuk meredam gerakan ini, di antaranya Peristiwa Cimanggis, Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, hingga Tragedi Lampung. Gerakan 1998 terus berlanjut hingga pemilu 1999, yang akhirnya berhasil memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya yang telah mencengkeram Indonesia selama tiga decade. Sumber Referensi (<https://www.amazine.co/39449/apa-itu->

people-power-fakta-sejarah-informasi-lainnya/)

D. Indikator Pengukuran Kinerja Organisasi Publik (KPU)

(Dwiyanto, 2009:228-229) mengemukakan ada lima indikator untuk mengukur kinerja birokrasi, yaitu:

1. Produktivitas. Konsep produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efesiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan.
2. Kualitas pelayanan, isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat menjadikan indikator kinerja organisasi publik.
3. Responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk menganali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas layanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik

sesuai dengan kebutuhan dan apresiasi masyarakat.

4. Renponsibilitas. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau dengan kebijakan organisasi baik yang eksplesit maupun implisit (Lenvine, 1990)
5. Akuntabilitas. Mampu memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepadanya (amanah)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan mencermati beberapa fenomena mengenai isu ajakan *People power* (Sejumlah Tokoh) Terhadap Ketidak Puasan Kinerja KPU Pada Pemilu Tahun 2019 di media sosial lalu dilakukan beberapa analisis tentang indikator kinerja KPU dengan mengambil teori dari beberapa materi dan sumber yang terdapat dalam buku, data kualitatif menurut Sugiyono merupakan data-data yang bukan berbentuk angka (Sugiyono, 2006: 14) Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisa data interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Sedangkan focus penelitian adalah lima indikator untuk mengukur kinerja Komisi Pemilihan Umum menurut Dwiyanto, 2009:228-229 yang meliputi : 1. Produktivitas, 2.Kualitas pelayanan, 3. Responsivitas, 4. Responsibilitas, 5. Akuntabilitas.

PEMBAHASAN

1. Produktivitas

Pada pemilu 2019 yang diselenggarakan oleh Panitia Komisi Pemilihan Umum (KPU) diselenggarakan dengan cara serentak baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten yang sebelumnya diselenggarakan secara terpisah menurut ketentuan jenjang waktu. Namun, pemilihan pada kali ini dilakukan secara serentak yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini, tentu dengan alasan yang rasional karena untuk menghemat biaya pemilu namun tidak mengurangi dari pemelihan yang diselenggarakan secara serentak. Selain itu, kotak logistic KPU juga dibuat sederhana namun tidak mengurangi keamanan dari kegiatan pemilu.

Maka berdasarkan panitia KPU bahwa tujuan dari diselenggarakan pemilu secara serentak pada 19 April 2019, agar penyelenggaraan pemilu serentak lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Berdasarkan perhitungan anggota KPU saat itu, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, yang mereka kutip dalam permohonan, penyelenggaraan pemilu serentak bisa menghemat anggaran Rp 5 sampai Rp 10 triliun. Sedangkan berdasarkan perhitungan Anggota DPR F-PDIP Arif Wibowo, pemilu serentak mampu menghemat dana sekitar Rp 150 triliun, atau sepersepuluh APBN dan APBD. (kumparan.com)

2. Kualitas Pelayanan

Kepuasan Publik dalam penyelenggaraan pemilu pada kali ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengenali calon wakilnya sedalam-dalamnya, dengan segemen kampanye waktu yang cukup lama. Maka, calon wakil takyapun memiliki waktu yang cukup lama dari pendaftaran, masa kampanye, masa tenang sampai pada pelaksanaan pemilu. Sehingga, mereka memiliki kesempatan unttk menyampaikan sejelas-jelasnya mengenai tujuan dan maksud dari pencalonan dirinya.

Disisi lain pemilih diberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk menilai, memahami dan memilih sesuai dengan kehendaknya, kriteria yang rakyat inginkan. Maka kesempatan ini sebagai wujud dari tujuan demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat peserta pemilih diseluruh lapisan masyarakat baik di kota, desa bahkan pelosok dan daerah pedalaman tertinggal untuk juga ikut aktif memilih calon wakil rakyatnya tanpa ada pengecualian dimasing-masing lapisan tersebut.

Maka untuk menjamin kepuasan kualitas pelayanan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU memiliki tugas untuk tidak ikut campur dan intervensi wilayah rakyat dalam memilih calon wakil rakyatnya serta menjaga kerahasiaan dari pilihan rakyat.

3. Responsivitas

Dalam penyelenggaraan pemilu serentak kali ini KPU juga sebagai pelaksana demokrasi, KPU melakukan sosialisasi kepada rakyat pemilih untuk bisa mengecek di situs KPU apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Maka, hal ini menjadi tugas KPU untuk memberikan wadah kesempatan bagi rakyat pemilih untuk

mengetahui bahwa dirinya sudah terdaftar menurut pencatatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Inisiatif ini merupakan bentuk respon KPU untuk terlibat massif untuk mengetahui jumlah hak pemilih tahun 2019 yang nanti pada penyelenggaraannya sesuai dengan data jumlah pemilih tetap, sesuai dengan hasil keputusan KPU bahwa pemilih tetap Indonesia harus daftar Pemilih Tetap dari hasil perbaikan ketiga atau DPThp 3. Jumlah pemilih yang ditetapkan dalam DPThp 3 meningkat dibanding jumlah pemilih DPThp 2 menjadi 192.866.254. Angka ini terdiri dari pemilih dalam negeri dan luar negeri. "Jumlah total pemilih di dalam negeri 190.779.969 pemilih. Jumlah pemilih di luar negeri total 2.086.285 pemilih," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, (8/4/2019). Dalam hasil rekapitulasi DPThp 3, 15 Desember 2018 lalu, total ada 192.828.520 pemilih. Jumlah ini terdiri dari 190.770.329 pemilih dalam negeri dan 2.058.191 pemilih di luar negeri. Jika dibandingkan dengan DPThp 2, total ada penambahan jumlah pemilih sebanyak 37.734, sebanyak 9.640 pemilih dari dalam negeri dan pemilih luar negeri bertambah 28.094 pemilih. Penambahan jumlah pemilih

diikuti dengan bertambahnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Total ada 809.699 TPS di dalam negeri. Jumlah ini bertambah sebanyak 199 TPS, dari jumlah sebelumnya sebesar 809.500 TPS. "Terdapat penambahan 199 TPS, 46 TPS itu penambahan TPS baru, sementara 153 TPS itu TPS hasil regrouping. Regrouping itu TPS sudah ada, hanya karena ada beberapa perubahan, maka dilakukan regrouping," ujar Arief. Sementara itu, di

4. Responsibilitas

Dalam penyelenggaraan pemilu serentak ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki agenda , teknis dan prosedur pelaksanaan pemilu yang disetujui bersama, sesuai dengan teknis tersebut pemilu yang diselenggarakan Panitia KPU mulai dari daftar partai sebanyak 14 partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu mendatang dengan nomor urutnya. 1: Partai Kebangkitan Bangsa, 2: Partai Gerindra, 3: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 4: Partai Golkar, 5: Partai Nasdem, 6: Partai Garuda, 7: Partai Berkarya. Lalu, 8: Partai Keadilan Sejahtera, 9: Partai Perindo, 10: Partai Persatuan Pembangunan, 11: Partai Solidaritas Indonesia, 12: Partai Amanat Nasional, 13: Partai Hanura, dan 14: Partai Demokrat. Sejak 17 Februari 2018 semua

luar negeri ada TPS. Dua metode lainnya, yaitu kotak suara keliling (KSK) berjumlah 2.326, dan pos sebanyak 426. (JAKARTA, KOMPAS.com)

Tentu tujuan dari Respon yang tinggi dari KPU akan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu dan mencegah kemungkinan terjadinya golput pada pemilu 2019.

peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye hingga 23 September 2018. Masa kampanye pemilu baru akan berlangsung mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019.

Berikut tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara lengkap seperti dikutip dari laman <https://infopemilu.kpu.go.id>, Rabu (28/2/2018). 17 Agustus 2017-31 Maret 2019 perencanaan program dan anggaran. 1 Agustus 2017-28 Februari 2019 penyusunan peraturan KPU. 17 Agustus 2017-14 April 2019 sosialisasi. 3 September 2017-20 Februari 2018 pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. 19 Februari 2018-17 April 2019 penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu. 9 Januari-21 Agustus

2019 pembentukan badan penyelenggara. 17 Desember 2018-18 Maret 2019 pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. 17 April 2018-17 April 2019 penyusunan daftar pemilih di luar negeri. 17 Desember 2017-6 April 2018 penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil). 26 Maret 2018-21 September 2018 pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta pencalonan presiden dan wakil presiden. 20 September 2018-16 November 2018 penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pencalonan presiden dan wakil presiden. 24 September-16 April 2019 logistik. 23 September 2018-13 April 2019 kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. 22 September 2018-2 Mei 2019 laporan dan audit dana kampanye. 14 April 2019-16 April 2019 masa tenang. 8 April 2019-17 April 2019 pemungutan dan penghitungan suara. 18 April 2019-22 Mei 2019 rekapitulasi penghitungan suara. 23 Mei 2019-15 Juni 2019 penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Juli-September 2019 peresmian keanggotaan. Agustus-Oktober 2019 pengucapan sumpah/janji.

Sumber (<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019?page=2>).

5. Akuntabilitas

Dalam memberikan kepuasan kepada publik sebagai peserta pemilih. KPU, memiliki tugas pertanggung jawaban untuk memberikan proses keterbukaan informasi seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk juga bisa memantau secara jelas atas proses perkembangan peroleh suara secara terbuka.

Untuk menambah keyakinan rakyat pemilih dari kegiatan penyelenggaraan pemilu yang transparan, kami sajikan gambar-gambar yang diambil dari situs KPU atas hasil penghitungan suara dan konten yang berisi mengenai segala informasi yang dibutuhkan publik tentang proses pemilu sebagai berikut ;



P
K
1

dan tidak diterima secara rasional menurut pengetahuan. Karena, jika di ukur dari sudut pandang produktivitas kinerja KPU. Tentu, ajakan people power sejumlah tokoh tersebut terbantahkan. Setidaknya, kita mengetahui kinerja KPU dengan inisiatif pemilu serentak ini akan menghemat biaya pemilu secara signifikan. Selain itu, pemilu kali ini mengajarkan pengalaman kepada rakyat tentang kesadaran berdemokrasi

2. Kualitas Pelayanan

Komisi Pelayanan Umum (KPU) memberikan kebebasan dan kesempatan seluas-luasnya kepada Partai Politik dan

calon legeslatif untuk mengenalkan profilnya kepada pemilih, dan pemilih diberikan seluas-luasnya untuk menggunakan hak suaranya sebagai pemilih sesuai dengan keyakinannya tanpa intervensi dan paksaan dari pihak manapun.

Ajakan *People Power* mengandung misi terselubung, karena hanya mempertentangkan perolehan suara dari calon presiden, sedang disisi lain tidak mempertentangkan hasil perolehan suara dari calon legeslatif (dari partai koalisi) yang menang. Dari paparan sejumlah tokoh politik menyampaikan jika capresnya yang diusung menang tidak akan memperlakukan hasil perolehan suara, namun jika yang menang adalah capres lain kemudian akan mempertentangkan hasil perolehan suara tersebut

3. Responsivitas

Rakyat Indonesia semakin tertarik untuk menggunakan hak suaranya karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat responsif dalam menyediakan media sebagai pusat informasi dari penyelenggaraan pemilu serentak 2019, maka rakyat pemilih akan mengetahui apakah dirinya sudah menjadi pemilih tetap yang tercatat di media KPU atau tidak.

Sehingga ajakan *People power* terbantahkan dengan kinerja KPU, karena KPU telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat, maka rakyat pun berfikir bahwa terselenggaranya pemilu pada kali ini dirasa sangat penting bagi hak suara yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.

4. Responsibilitas

Tentu mekanisme dan agenda prosedur yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat detail dan tidak memihak kepada salah satu kelompok, terbukti tidak ada gugatan dan kritik mulai dari pendaftaran hingga pemilihan, namun kritik itu datang

hanya pada saat perolehan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka, hal ini sangat tidak kooperatif, harusnya jika memang ada mekanisme yang keliru sudah bisa diidentifikasi dari pelaksanaan pemilu dari awal sampai akhir.

Namun ajakan *People power* tersebut baru ada setelah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), padahal kelompok yang menggugat atas perolehan suara tersebut menyetujui dan mengikuti serta mentaati prosedur yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

5. Akuntabilitas

Dalam memberikan pertanggung jawaban yang total kepada rakyat Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan akses informasi mengenai perolehan suara dari pemilihan Pilpres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, sampai DPRD Kabupaten. Semuanya, bisa dilihat melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kpu.go.id. tidak hanya itu, proses penghitungan pun dilakukan secara manual ditingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Hal ini dilakukan untuk memberikan pertanggung jawaban secara maksimal kepada semua publik bahwa proses penghitungan suara dilakukan secara transparan dan mencegah terjadinya kemungkinan potensi kecurangan.

Maka ajakan *People power* yang berujung anarkis tentu menyalahi mekanisme dan aturan yang ada, karena pemerintah pun memberikan kepada semua pihak jika tidak puas dengan hasil perolehan suara bisa digugat melalui jalur hukum yaitu dengan

mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.

Saran

1. Produktivitas

Tidak ada suatu pekerjaan yang sempurna sesuai dengan rencana di awal, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dengan sungguh-sungguh menuangkan ide dan gagasan sebagaimana pemilu serentak agar lebih efektif dan efisien baik dari waktu penyenggaraan pemilu, kebutuhan logistic, fasilitas dan anggaran yang lebih irit.

Disisi lain seluruh warga Indonesia hendaknya tidak terburu-buru menilai kegagalan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu tanpa melakukan pengkajian lebih mendalam kinerja yang sudah di tunjukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

2. Kualitas Pelayanan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan tugasnya dengan tuntas. Hal ini perlu apresiasi dari publik dimana pekerjaan KPU sangat berat. Mengingat jumlah penduduk yang sangat banyak dan jangkauan wilayah yang sangat luas. Namun, KPU berhasil memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pemilih baik di dalam negeri ataupun luar negeri.

3. Responsivitas

Respon yang begitu tinggi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mensukseskan kegiatan pemilu serentak perlu adanya timbal balik yang positif dari publik, agar kegiatan pemilihan yang nantinya diselenggarakan dipemilu-pemilu selanjutnya tertanam

sebuah motivasi yang tinggi untuk terus melakukan evaluasi dalam mencapai pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

4. Responsibilitas

Mekanisme dan prosedur yang direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan tanpa dengan alasan yang jelas, karena dari tahap demi tahap pelaksanaan pemilu tersebut memberikan kesempatan bagi calon dan pemilih untuk juga ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu serentak.

5. Akuntabilitas

Pertanggung jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tinggi akan memberikan proses pentingnya berdemokrasi, tentu Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan selalu mengevaluasi dari hal-hal yang kurang pada pemilu kali ini akan menjadi materi perbaikan pemilu dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Alford, Robert. R, and Roger Friedland. 1985. *Powers of Theory, Capitalism, the State, and Democracy*. Cambridge University Press.
- Cutlip, Scott M.et.al, 2007. *Effective public Relation*, Edisi IX, cetakan ke-2. Jakarta : Kencana
- Dunn, N.William.1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.

- Dwiyanto, Agus 2003. *Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan, policy, Policy Brief*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Herabudin. 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*. Pustaka Setia. Bandung
- Hogwood, Brian W, and Lewis A.Gunn. 1986, *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Penerbit Gava Media.
- Jekfins, Frank. 2005, *Public Relations*, Jakarta, Erlangga.
- Prescot, S.C and G Dunn. 1959. *Industrial Microbiology*. The AVI Publishing, Company Inc, Westport-Connecticut.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung

Sumber Media Sosial

Jakarta, KOMPAS.com Kabar berita TV
One pada tanggal 29 Mei 2019 jam
17.00 KPU.go.id

<https://www.amazine.co/39449/apa-itu-people-power-fakta-sejarah-informasi-lainnya/>

<https://kumparan.com/@kumparannews/memahami-lagi-alasan-pilpres-dan-pileg-digelar-serentak-tahun-2019-1542495076123429491>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019?page=2>